

MEMBANGUN KEAJAIBAN WILAYAH PERDESAAN



DR. IR. SUGENG BUDIHARSONO

2017

MEMBANGUN KEAJAIBAN WILAYAH PERDESAAN

Oleh:

Dr. Ir. Sugeng Budiharsono

Cetakan Pertama

Undang-undang No 19 Tahun 2002

Tentang

Hak Cipta

Pasal 72

- (1) Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dipidana paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara lama 7 (tujuh) tahun dan atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Perpustakaan Nasional katalog dalam terbitan (KDT)

Budiharsono, Sugeng

Membangun Keajaiban Wilayah Perdesaan/oleh Sugeng
Budiharsono

Cet: 1. –Jakarta: , 2017
xxiii, 544 hal: 25 cm

ISBN

1. Ekonomi

1. Judul

SEKAPUR SIRIH

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Allah swt yang telah memberikan rahmat dan berkahNya sehingga buku *Membangun Keajaiban Wilayah Perdesaan* dapat diselesaikan. Buku ini merupakan suatu upaya agar para pengambil kebijakan, akademisi, dunia usaha dan masyarakat lebih memperhatikan pembangunan wilayah perdesaan yang selama ini tertinggal dari wilayah perkotaan akibat adanya bias pembangunan yang lebih condong kepada wilayah perkotaan. Dengan dibangunnya wilayah perdesaan diharapkan dapat mengurangi kemiskinan di perdesaan, kesenjangan antara perkotaan dan perdesaan dan memperkuat struktur perekonomian Indonesia.

Buku ini mengadopsi cara pandang *Appreciative Inquiry* (AI) dari David L. Cooperrider *et al.* (2005 dan 2008) dan Arah Baru Model Pembangunan Wilayah yang dikembangkan oleh Michael E. Porter (2014). Cara pandang *Appreciative Inquiry* adalah membangun wilayah perdesaan dengan kekuatan aset yang dimiliki yang apabila dibangun akan tercipta keajaiban, sedangkan Arah Baru Model Pembangunan Wilayah menekankan bahwa pembangunan wilayah fokus Arah Baru Model Pembangunan Wilayah fokus antara lain pada daya saing; berbasis klaster dan membangun kekuatan dan potensi

yang ada. Pada galibnya konsep Porter hanya lebih merinci dari konsep Cooperider. Selama ini wilayah perdesaan selalu dipandang sebagai wilayah yang mempunyai banyak permasalahan antara lain kurangnya infrastruktur, sumber daya manusia yan berkualitas rendah, dan masyarakatnya masih terkungkung dengan nilai-nilai tradisional yang kurang mendukung pembangunan. Dengan cara pandang AI dan Arah Baru Model Pembangunan Wilayah, maka segalanya dibalik 180 derajat, semuanya aset wilayah perdesaan menjadi kekuatan dan dapat dibangun menjadi wilayah yang berdaya saing baik pada aras nasional maupun internasional.

Buku Membangun Keajaiban Wilayah Perdesaan terdiri dari sebelas bab yang memuat tentang perlunya pembangunan wilayah perdesaan, masalah keterkaitan wilayah perkotaan dan perdesaan, cara pandang dan pendekatan serta teori-teori yang melandasi pembangunan perdesaan, pilar pembangunan wilayah perdesaan, pengembangan kelembagaan ekonomi di aras kabupaten/kota, pengembangan klaster dan jejaring klaster, *region branding* wilayah perdesaan dan mengukur perkembangan pembangunan perdesaan. Dengan demikian dengan membaca buku ini pembaca diharapkan dapat memahami cara pandang, pendekatan, teori dan strategi pembangunan wilayah perdesaan serta mengaplikasikannya, sehingga akan terwujud keajaiban di wilayah perdesaan.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu mewujudkan buku ini, khususnya kepada para sahabat di Unit Manajemen Strategis, Kemendesa, PDT dan Transmigrasi, Forum PEL KEPRI, Klaster MAS Krakatau, Kabupaten Pandeglang, Ijen Tourism Cluster, Kabupaten Banyuwangi, seluruh Tenaga Ahli dan Asisten Tenaga Ahli penyusun RPKP 2017 dan para penyusun Indikator Kawasan Perdesaan di Ditjen PKP, Kemendesa, PDT dan Transmigrasi dan rekan sejawat lainnya yang tidak dapat disebutkan satu-persatu. Akhirnya penulis berharap agar buku ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan dapat memotivasi untuk membangun wilayah perdesaan lebih baik lagi.

Bogor, 12 Rabi'ul Awwal 1439

Persembahan orang-orang tercinta: Mimi, Bapak, isteriku
Maria, anak-anakku Nabilah, Gina Marisa, Saif Alhaq, Faiqah
Serena dan Sammy Elfahri Yusuf

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1. Wilayah Perdesaan Pilar Pembangunan Ekonomi Indonesia	2
1.2. Pengertian Perdesaan, Perkotaan dan Kontinum Perdesaan-Perkotaan	7
1.3. Sistematika Buku	13
BAB 2. CARA PANDANG DAN PENDEKATAN	16
2.1. Cara Pandang <i>Appreciative Inquiry</i>	16
2.2. Pendekatan Berbasis Aset	24
2.3. Pendekatan Penghidupan Perdesaan Berkelanjutan	32
BAB 3. TEORI YANG MENDASARI PEMBANGUNAN PERDESAAN	37
3.1. Ruang dan Wilayah	37
3.2. Teori Lokasi	55
3.3. Pembangunan Berkelanjutan	92
3.4. Pembangunan Berpusat kepada Manusia	103
3.5. Pengembangan Ekonomi Lokal dan Klaster	109
3.6. Daya Saing Wilayah	132
3.7. Rantai Nilai	144
3.9. Keterkaitan Desa-Kota	150
3.8. Masyarakat Perdesaaan Tangguh Bencana	161
	ix

BAB 4.	PILAR PEMBANGUNAN WILAYAH PERDESAAN	
	4.1. Kebijakan Berbasis Tempat (<i>Place-based Approach</i>)	178
	4.2. Kelembagaan Klaster	188
	4.3. Daya Saing Wilayah	192
	4.4. Kewirausahaan Sosial	199
	4.5. Proses Multistakeholder	211
BAB 5.	PROSES PEMBANGUNAN WILAYAH PERDESAAN	223
	5.1. Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah Perdesaan	224
	5.2. Prinsip Pembangunan Wilayah Perdesaan	229
	5.3. Penetapan Wilayah Perdesaan	230
BAB 6.	PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN DI ARAS KABUPATEN/KOTA	
	6.1. Membangun Aliansi Kemitraan	235
	6.2. FEDEP di Aras Kabupaten/Kota di Jawa Tengah	239
	6.3. Pembentukan Forum PEL, Pengalaman Provinsi Kepulauan Riau (KEPRI)	249
	6.4. Fasilitasi Pembinaan Forum PEL	259
BAB 7.	PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN KLASTER	260
	7.1 Fasilitasi Pembentukan Manajemen Klaster	263
	7.2. Penyusunan AD dan ART Klaster	266
	7.3. Penentuan Komoditas Unggulan Klaster	267

		Halaman
	7.4. Pengembangan Jejaring Klaster	273
	7.5. Penyusunan Rencana Aksi Organisasi dan RPWP	275
	7.6. Fasilitasi Pembinaan Klaster	276
BAB 8.	PENYUSUNAN RPWP	277
	8.1. Penyusunan RPWP	278
	8.2. Pelaksanaan Pembangunan Wilayah Perdesaan	318
	8.3. Monitoring dan Evaluasi	319
BAB 9.	<i>BRANDING</i> WILAYAH PERDESAAN	324
	9.1. Merek dan Merek Negara	325
	9.2. Unsur Pembentuk Merek Negara	330
	9.3. Arsitektur Merek Wilayah/Tempat	338
	9.4. Perkembangan Pemerekan Berbasis Tempat	342
	9.5. Pemasaran dan Pemerekan Klaster	345
	9.6. Cara Membangun Merek Tempat/ Klaster	354
	9.7. Instrumen dalam Pemerekan Tempat	334
	9.8. Cara Sukses Membuat Pemerekan Tempat yang Baik	376
	9.9. Faktor Penyebab Kegagalan Pemerekan Tempat	380
BAB 10.	MENGUKUR PERKEMBANGAN WILAYAH PERDESAAN	390
	10.1. Indeks Perkembangan Wilayah Perdesaan	390
	10.2. Dimensi, Peubah dan Indikator	397
	10.3. Metode Analisis	415
	10.4. Penentuan Indeks Komposit	428
	10.5. Penggunaan Program Kemasan RATRURAL	435

	Halaman
10.6. Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data	435
10.7. Teladan	438
BAB 11. PENUTUP	456
DAFTAR PUSTAKA	458
LAMPIRAN	473
Lampiran 1 Manual Penentuan Batas Kawasan	474
Lampiran 2 Contoh SK Bupati/Walikota tentang Penetapan Kawasan	486
Lampiran 3 Contoh Berita Acara Pembentukan Manajemen Klaster	488
Lampiran 4 Contoh AD dan ART Klaster Wisata Ijen	490
Lampiran 5 Contoh Berita Acara Kesepakatan Penetapan Komoditas Unggulan Kawasan	504
Lampiran 6 Contoh Peta Keterkaitan Antar Desa dalam Kawasan dan Antar Kawasan di Klaster MAS Krakatau, Kabupaten Pandeglang	507
Lampiran 7 <i>Template</i> Perhitungan Biaya Pembangunan Prasarana dan Sarana	508
Lampiran 8 <i>Template</i> Program dan Rencana Aksi Pengembangan Kawasan Perdesaan yang Dibiayai Pemerintah	509

	Halaman
Lampiran 9	<i>Template</i> Program dan Rencana Aksi Pengembangan Kawasan Perdesaan yang Dibiayai Masyarakat dan Dunia Usaha 515
Lampiran 10	<i>Template</i> Indikator Capaian Kegiatan Tahunan 516
Lampiran 11	Cara Meng-install Program RATRURAL dan PENBOT 522
Lampiran 12	Cara mengoperasikan Program RATRURAL 536
Lampiran 13	Cara mengoperasikan Program PENBOT 542

DAFTAR TABEL

Halaman

Teks

2.1	Delapan Bentuk Modal Setara Nilai Uang	32
3.1	Konsep Ruang Levebfre	44
3.2	Hubungan antara Konsep Ruang dari Lefebvre dan Soja	47
3.3	Zonasi Lahan Menurut Von Thunen	60
3.4	Karakteristik Teori Lokasi dan Relokasi	81
3.5	Perbedaan Pilihan Lokasi oleh UKM dan Usaha Besar	88
3.6	Perbedaan Teori Pertumbuhan, Pemerataan dan PBM	10
3.7	Pengembangan Ekonomi Lokal dan Ekonomi Tradisional	110
3.8	Pengembangan Ekonomi Lokal dan Pemberdayaan Masyarakat	111
3.9	Perbedaan antara Inovasi dan Kreativitas	141
3.10	Perbedaan Model Pusat/Kutub Pertumbuhan dan Klaster/Jejaring Wilayah	157
3.11	Beberapa Konsep Ketangguhan Bencana	170

4.1	Perbedaan Paradigma Pembangunan Lama dan Baru	183
4.2	Hubungan antara Tipologi Partisipasi dari Arnstein dan Proses Multi-Stakeholder dari Warner	214
6.1	Jadwal Worksop Fasilitasi Pembentukan Forum PEL di Aras Provinsi KEPRI	251
7.1	Kriteria Penentuan Komoditas Unggulan Klaster	272
8.1	Jadwal Workshop	283
8.2	Obyek Penting yang Diamati dan Dikukur Koordinatnya	305
8.3	Jenis dan Sumber Data Sekunder	307
8.4	Produksi Barang dan Jasa dari Wilayah Pada Kondisi Awal dan Lima Tahun Mendatang	310
8.5	Penyerapan Tenaga Kerja pada Kondisi Awal dan Lima Tahun Mendatang	312
8.6	Pendapatan Perkapita dan Penduduk Miskin	313
8.7	Contoh Jadwal Acara Pembahasan RPKP di Aras Kabupaten/Kota	317
8.8	Contoh Laporan Monitoring Pelaksanaan Pembangunan Wilayah Perdesaan	322

Halaman

9.1	Perbedaan antara Merek Negara, Merek Produk dan Merek Perusahaan	328
9.2	Keuntungan Fungsional yang Diperoleh oleh Setiap Jenis Aktor Klaster	354
10.1	Pro dan Kontra tentang Indeks Komposit	394
10.2	Peubah dan Indikator Dimensi Ekonomi	400
10.3	Peubah dan Indikator Dimensi Sosial Budaya	404
10.4	Peubah dan Indikator Dimensi Lingkungan	407
10.5	Peubah dan Indikator Dimensi Kelembagaan	411
10.6	Hubungan antara Goodness of fit dan Stress	427
10.7	Skala Angka Saaty	431
10.8	Nilai Acak Konsistensi	433
10.9	Kuesioner Pembobotan Dimensi	437
10.10	Data Hasil Survey dari Wilayah Perdesaan/Klaster MAS	439
10.11	Penentuan Indeks Pembangunan Wilayah Perdesaan (IPWP) MAS	450

Halaman

10.12	Atribut Pengungkit dan Rencana Kegiatan Tahun 2018-2019	451
10.13	Nilai Skor Awal dan Akibat Intervensi	453
10.13	Indeks Komposit Setelah Intervensi	455

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Teks

2.1	Perbedaan antara Cara Pandang AI dan Pemecahan Masalah	18
2.2	Perbedaan AI dan Pemecahan Masalah dalam Memandang Pembangunan Pertanian di Kabupaten Sumba Timur	19
2.3	Metode 4D dalam <i>Appreciative Inquiry</i>	21
2.4	Oktagonal Aset/Modal	27
2.5	Skema Penghidupan Berkelanjutan	35
2.6	Modifikasi Kerangka Kerja Penghidupan Berkelanjutan	36
3.1	Cincin Von Thunnen	59
3.2	Segitiga Lokasi	62
3.3	Diagram Smith dengan Biaya Beragam	65
3.4	Kurva Permintaan Losch dan Kerucut Permintaan	67
3.5	Diagram Smith dengan PR Beragam	67
3.6	Biaya dan Penerimaan Rata-rata Beragam	68

	Halaman	
3.7	Matriks Pendekatan Perilaku dari Pred	72
3.8	Tahapan Pengambilan Keputusan Penentuan Lokasi	81
3.9	Pilihan untuk Proses Produksi Berkelanjutan	89
3.10	Pilihan untuk Pengaturan Lokasi Berkelanjutan	90
3.11	Hubungan antara Keberlanjutan dan Ketidakpastian	91
3.12	Unsur-unsur Pembangunan Berkelanjutan	95
3.13	Model Boneka Rusia Pembangunan Berkelanjutan	99
3.14	Prisma Keberlanjutan	101
3.15	Heksagonal PEL	115
3.16	Tahap Perkembangan Klaster	131
3.17	Modifikasi Model Piramida Daya Saing Daerah Imre Lengyel	136
3.18	Topi Daya Saing Wilayah	137
3.19	Tahapan Pembangunan Negara Menurut Tingkat Daya Saingnya	138
3.20	Tahapan Pembangunan Daerah Menurut Tingkat Daya Saing	139

Halaman

3.21	Modifikasi Hubungan Inovasi dan Daya Saing	141
3.22	Hubungan antara Pemerintah, Dunia Usaha dan Perguruan Tinggi/Lembaga Penelitian dalam menghasilkan Inovasi	143
3.23	Keterkaitan antara Komponen <i>Hardware</i> , <i>Orgware</i> , <i>Software</i> , dan <i>Brainware</i>	143
3.24	Gelombang Ekonomi Dunia	144
3.25	Unsur-unsur Rantai Nilai Porter	146
3.26	Rantai Nilai Vertikal dan Horizontal untuk Tanaman Sisal dan Sapi Potong	156
3.27	Perbedaan Model Kutub Pertumbuhan dan Keterkaitan dan Ketergantungan Perdesaan-Perkotaan	158
3.28	Contoh Penerapan Model Klaster/ Jejaring Wilayah di Kota Venlo Belanda	159
3.29	Siklus Pengelolaan Bencana	165
3.30	Kategorisasi Model Pengelolaan Bencana	166
4.1	Pentagonal Pembangunan Wilayah Perdesaan	179
4.2	Model dan Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Wilayah Perdedaan	181
4.3	Dasar dan Risiko Pendekatan Pembangunan Berbasis Tempat	187

Halaman

4.4	Evolusi Ketiga Peran Institusi dalam Membentuk Kewirausahaan Sosial	207
4.5	Proses Membangun PMS	217
4.6	Proses Inti Membangun PMS	218
4.7	Tahapan Membangun PMS	219
5.1	Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan	224
5.2	Langkah-langkah Ajaib Membangun Wilayah Perdesaan	228
5.3	Proses Penetapan Wilayah Perdesaan	232
6.1	Keterkaitan Berbagai Lembaga	239
7.1	Tahapan Pengembangan Kelembagaan Klaster	262
7.2	Tahapan Penetapan Komoditas Unggulan Klaster	268
7.3	Keterkaitan antara Budidaya Tanaman Sisal dan Sapi	274
7.4	Jejaring Klaster di Kabupaten Sumba Timur	275
8.1	Tahapan Proses Penyusunan RPWP	279
8.2	Desain Ruang Metode Kafe Dunia	281

Halaman

8.3	Peralatan yang Digunakan dalam Workshop	292
8.4	Hubungan antara RPWP dan Dokumen Rencana Lainnya dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah	295
8.5	Substansi dan Aliran Pelaporan Monitoring dan Evaluasi	321
9.1	Asal dan Interpretasi dari Merek/Pemerekan Negara	329
9.2	Heksagonal Merek Negara	331
9.3	Heksagonal Merek Negara Vukman	335
9.4	Oktagonal Merek Negara	336
9.5	Heksagonal Merek Tempat/Wilayah	337
9.6	Arsitektur Merek	340
9.7	Hubungan Antara Merek Klaster dan Merek Tempat	342
9.8	Perkembangan Pemerekan Tempat Menurut Lintasan Waktu	343
9.9	Proses Pemerekan Wilayah/Klaster	356
9.10	Desa Pelangi Semarang	373
10.1	Arsitektur Penentuan Indeks Perkembangan Wilayah Perdesaan	392

10.2	Jarak Euclidean dalam 2 Dimensi	417
10.3	Proses Analisis dengan Menggunakan RAPFISH Berbasis MDS	422
10.4	Prosedur Analisis dengan RAPFISH Berbasis MDS untuk Empat Dimensi	423
10.5	Arsitektur Program Rapfish	424
10.6	Ordinasi RATRURAL Dimensi Ekonomi	440
10.7	<i>Leverage Attributes</i> Dimensi Ekonomi	441
10.8	Ordinasi RATRURAL Dimensi Sosial	442
10.9	<i>Leverage Attributes</i> Dimensi Sosial	443
10.10	Ordinasi RATRURAL Dimensi Lingkungan	444
10.11	<i>Leverage Attributes</i> Dimensi Lingkungan	445
10.12	Ordinasi RATRURAL Dimensi Kelembagaan	446
10.13	<i>Leverage Attributes</i> Dimensi Kelembagaan	447
10.14	Diagram Layang-layang Dimens	448
10.15	Diagram Layang-layang Sebelum dan Sesudah Intervensi	454



PENDAHULUAN

Perdesaan tidak sama dengan pertanian dan kemandekan ekonomi (OECD)

Pembangunan wilayah perdesaan selama masa Reformasi relatif kurang diperhatikan dibandingkan pada zaman pemerintahan Presiden Soeharto yang sangat kental perhatiannya terhadap kawasan perdesaan dan sektor pertanian. Namun pembangunan perdesaan menemukan kembali momentumnya pada saat Presiden Jokowi mencanangkan sembilan agenda prioritas pembangunannya yang disebut Nawa Cita. Cita ketiga adalah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Agenda prioritas tersebut kemudian dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Hal itu juga sejalan dengan Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa serta penanggulangan kemiskinan.

Buku ini ini merupakan suatu upaya agar para pengambil kebijakan, akademisi, dunia usaha dan masyarakat lebih memperhatikan pembangunan wilayah perdesaan yang selama ini tertinggal dari wilayah perkotaan akibat adanya bias pembangunan yang lebih condong kepada wilayah perkotaan. Dengan dibangunnya wilayah perdesaan diharapkan dapat mengurangi kemiskinan di perdesaan, kesenjangan antara perkotaan dan perdesaan dan memperkuat struktur perekonomian Indonesia.

Perhatian terhadap perdesaan juga bukan hanya di Indonesia, namun juga di negara-negara yang tergabung dalam OECD. Hal ini dikarenakan seperempat penduduk dari negara-negara tersebut tinggal di wilayah perdesaan. Negara-negara OECD juga telah mengembangkan paradigma pembangunan wilayah perdesaan yang baru. Untuk melaksanakan kebijakan pembangunan wilayah perdesaan dengan paradigma baru tersebut memerlukan empat langkah kritis (OECD, 2017), yaitu: (1) Memanfaatkan peluang dari interaksi keterkaitan dan ketergantungan pedesaan-perkotaan; (2) Meningkatkan produktivitas pedesaan; (3) Mengidentifikasi dan mengadopsi mekanisme layanan di pedesaan yang inovatif; dan (4) Memperbaiki dialog kebijakan internasional. Kalau OECD saja memperhatikan pembangunan wilayah perdesaannya, apalagi Indonesia yang lebu dari tiga

perempat wilayahnya merupakan wilayah perdesaan dan separuh penduduknya tinggal di wilayah perdesaan.

1.1. Wilayah Perdesaan Pilar Pembangunan Ekonomi Indonesia

Pembangunan yang berorientasi kepada pertumbuhan telah membawa dampak positif bagi pertumbuhan perekonomian di Indonesia selama beberapa dekade terakhir, walaupun beberapa kali terjadi krisis ekonomi. Orientasi pembangunan seperti hal tersebut menyebabkan pembangunan mengarah kepada sektor industri dan keuangan sebagai sektor modern dan daerah perkotaan yang sarana prasarananya lebih baik, sedangkan wilayah perdesaan yang sarana dan prasarananya kurang memadai dengan sector pertaniannya yang dianggap sebagai sector 'tradisional' relatif diabaikan.

Hal ini mengakibatkan terjadinya kesenjangan antara wilayah perdesaan dan perkotaan. Kondisi ini sebagai konsekuensi pengadopsian konsep pembangunan kutub pertumbuhan/pusat pertumbuhan oleh seluruh stakeholder di Indonesia. Dengan diterapkannya konsep kutub/pusat pertumbuhan maka akan terbentuk pusat-pusat pertumbuhan (kota-kota) dan diharapkan akan terjadi penetesan (*trickle down effects*) dari pusat-pusat pertumbuhan ke wilayah perdesaan (*hinterland*) secara otomatis, namun yang terjadi sebaliknya,

yaitu pengurasan sumber daya dari wilayah perdesaan (*backwash effects*).

Pengurasan sumber daya tersebut antara lain berupa: (a) eksploitasi sumber daya alam (hutan dan tambang) yang berlebihan; (b) konversi lahan-lahan pertanian menjadi kawasan industri, permukiman dan perdagangan; dan (c) pengurasan sumber daya manusia wilayah perdesaan (*brain drain*). Hal ini mengakibatkan terjadinya: (a) kerusakan lingkungan di wilayah perdesaan yang dampaknya juga mempengaruhi kondisi perkotaan; (b) berkurangnya kualitas sumber daya manusia di wilayah perdesaan; dan (c) terjadinya urbanisasi yang berlebihan, yang pada akhirnya menimbulkan berbagai persoalan di kota dan yang mengakibatkan bukan lagi *economies of scale* namun justru *diseconomies of scale*.

Kondisi tersebut akan semakin parah, apabila kota-kota dipacu untuk dapat bersaing di kancah internasional tanpa memperhatikan wilayah perdesaan. Karena dalam era globalisasi, persaingan adalah suatu keniscayaan. Namun, pengabaian terhadap wilayah perdesaan, akan menyebabkan semakin besarnya kesenjangan wilayah perkotaan dan perdesaan dan ketidakberlanjutan dari wilayah perkotaan itu sendiri.

Paradigma pembangunan yang *urban biased*, yang telah mempengaruhi *mindset* kita bahwa tingkatan wilayah

perkotaan dalam berbagai hal lebih baik dan lebih tinggi daripada wilayah perdesaan tersebut telah menimbulkan berbagai persoalan baik di wilayah perkotaan maupun di perdesaan. Pada masa mendatang perlu ada perubahan paradigma pembangunan wilayah perkotaan-perdesaan, agar dapat meningkatkan daya saing kedua wilayah tersebut tanpa meningkatkan kesenjangan antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Hal ini dikarenakan wilayah perdesaan selama ini memegang peranan penting dalam pembangunan Indonesia secara keseluruhan, khususnya dalam memasok hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, minyak dan gas bumi serta mineral lainnya, dan tenaga kerja murah.

Pembangunan wilayah perdesaan menjadi suatu keniscayaan untuk pembangunan perkotaan bahkan pembangunan Indonesia yang berkelanjutan. Sehingga para pengambil kebijakan publik harus menyadari bahwa keberlanjutan pembangunan ekonomi Indonesia ditentukan oleh keberlanjutan pembangunan wilayah perdesaan dan perkotaan. Implikasinya adalah bahwa pembangunan wilayah perkotaan harus terkait dan adanya saling ketergantungan dengan pembangunan wilayah perdesaan dan sebaliknya. Tanpa adanya kesadaran tersebut, maka kemiskinan penduduk di wilayah perdesaan semakin meningkat yang

lebih lanjut akan meningkatkan kesenjangan antara wilayah perkotaan dan perdesaan.

Pemerintah bukannya tidak menyadari tentang semakin meningkatnya kesenjangan wilayah perkotaan dan perdesaan, sehingga diperlukan keberpihakan terhadap pembangunan perdesaan. Pada tahun 2014 diterbitkan Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Khusus tentang pembangunan wilayah perdesaan, pada Pasal 83 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa pembangunan kawasan perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar desa dalam satu kabupaten/kota yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa di kawasan perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi telah menindaklanjuti amanah Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa tersebut dengan menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan. Peraturan Menteri tersebut selanjutnya dilengkapi dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Nomor 14/DPKP/SK/07/2016 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan. Kebijakan tersebut diharapkan dapat membangun wilayah perdesaan, yang terkait

dengan pembangunan perkotaan, sehingga tingkat kesejahteraan di pedesaan meningkat dan kesenjangan antara kedua wilayah tersebut menurun.

1.2. Pengertian Wilayah Pedesaan dan Pembangunan Wilayah Pedesaan

Pendefinisian wilayah pedesaan memerlukan pendekatan multifaset yang mengeksplorasi sifat-sifat wilayah pedesaan (*rurality*) dalam hal beberapa karakteristik utama. Karakteristik ini dapat dikategorikan menjadi tiga kelompok, yaitu:

1. Jarak dan Densitas. Seberapa jauh masyarakat pedesaan berasal dari pusat kota yang lebih besar dan berapa banyak orang per kilometer persegi berada di sana.
2. Demografi. Bagaimana profil demografis suatu komunitas, yaitu usia rata-rata, tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, profil bahasa, dan lain-lain, membentuk populasi dan kebutuhan mereka.
3. Karakteristik Sosial dan Budaya. Cara organisasi sosial masyarakat, bersama dengan sistem nilai dan kepercayaan, mempengaruhi spesifikasi suatu populasi.

Berbeda dengan pendapat di atas, menurut Cromartie and Bucholtz (2008), substansi untuk mendefinisikan kawasan

perdesaan berdasarkan aspek administrasi, penggunaan lahan dan ekonomi.

Definisi wilayah perdesaan dalam literatur sangat banyak ragamnya. Studi yang dilakukan oleh Bosak dan Perlman (1982) menyimpulkan bahwa ada empat kategori definisi wilayah perdesaan, yaitu:

1. Tidak dinyatakan: lembaga atau individu mendefinisikan wilayah perdesaan yang sesungguhnya tanpa definisi. Sebagai contoh, wilayah perdesaan adalah wilayah yang bukan wilayah perkotaan.
2. Verbal: definisi wilayah perdesaan menggunakan kriteria yang bersifat kualitatif, bukan kuantitatif. Walaupun karakteristik-karakteristik khusus dari wilayah perdesaan diuraikan namun sama sekali tidak menjelaskan nilai atau jumlah dari karakteristik tersebut.
3. Kuantitatif buatan sendiri: definisi yang dibuat sudah menyebutkan jumlah secara spesifik dari karakteristik wilayah perdesaan, namun tidak merujuk kepada sumber eksternal atau publikasi terdahulu atau data.
4. Kuantitatif eksternal: definisi sudah mengindikasikan nilai kuantitatif dari karakteristik wilayah perdesaan dengan menggunakan sumber eksternal, seperti data

sensus ataupun sumber publikasi penelitian sebelumnya.

Beberapa definisi tentang wilayah bperdesaan dari salah beberapa kategori definisi di atas sebagai berikut:

1. The United States Census Bureau (2012) dan The White House Office of Management and Budget (2013) mendefinisikan wilayah perdesaan mencakup semua populasi, perumahan, dan wilayah yang tidak termasuk dalam wilayah perkotaan.
2. Statistik Canada (2012) mendefinisikan wilayah perdesaan sebagai tempat dengan penduduk yang tinggal di luar permukiman sebanyak 1.000 orang atau lebih dengan kepadatan penduduk 400 orang per kilometer persegi, dengan populasi tidak terkonsentrasi, tapi tersebar dengan kepadatan penduduk yang rendah.
3. OECD (1994) mendefinisikan wilayah perdesaan pada aras lokal sebagai suatu wilayah dengan kepadatan penduduk kurang dari 150 jiwa per kilometer persegi.
4. Uni Eropa mendefinisikan wilayah perdesaan sebagai suatu wilayah dengan kepadatan penduduk kurang dari 100 jiwa per kilometer persegi.

Indonesia memiliki definisi tersendiri tentang wilayah perdesaan yaitu definisi berdasarkan Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Wilayah perdesaan yang dalam

undang-undang tersebut disebut Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Apabila dilihat dari klasifikasi definisi Bosak dan Perlman (1982), maka definisi pembangunan wilayah ini termasuk yang bersifat verbal. Dari sisi substansi, definisi ini termasuk yang ketinggalan zaman, karena masih ada kata-kata didominasi oleh sektor pertanian, karena di beberapa negara maju dan negara berkembang yang sedang menuju negara maju, sektor pertanian tidak lagi menjadi dominan. Sektor industri antara lain industri berbasis pertanian (*agro-based industry*) atau industri lainnya, ataupun sektor jasa, seperti pariwisata, bahkan mendominasi di wilayah perdesaan. Di beberapa wilayah perdesaan di Indonesia seperti di Banyuwangi, Wakatobi, Raja Ampat dan Bali, sektor perekonomian yang mendominasi adalah sektor wisata.

Definisi pembangunan wilayah perdesaan juga memiliki banyak ragamnya. Beberapa definisi pembangunan wilayah perdesaan antara lain (Kim dan Yang, 2016):

1. Moseley (2003) mendefinisikan pembangunan pedesaan sebagai "proses peningkatan kualitas hidup dan

kesejahteraan ekonomi orang-orang yang tinggal di daerah yang relatif terpencil dan jarang penduduknya.

2. Lee *et al.* (2012) juga mendefinisikan pembangunan pedesaan sebagai "proses peningkatan kualitas hidup masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan." Apalagi Lee *et al.* menekankan bahwa kebijakan pembangunan pedesaan menangani isu-isu yang lebih luas yang terkait tidak hanya dengan industri dan ekonomi lokal tetapi juga berbagai sektor termasuk transportasi, perawatan medis, budaya, kesejahteraan dan lingkungan.
3. Jeong (1997) mendefinisikan pembangunan pedesaan sebagai rangkaian proses yang membawa perbaikan kondisi kehidupan bagi masyarakat lokal melalui partisipasi dan komitmen masyarakat sebagai sebuah kelompok. Jeong melanjutkan bahwa program pembangunan pedesaan tersebut mengejar tujuan melalui proyek yang didukung oleh pemerintah, LSM, atau perusahaan, dan melibatkan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proyek yang diperlukan untuk mencapai tujuan umum ekonomi, sosial, dan psikologis masyarakat lokal atau untuk memecahkan tantangan umum
4. Rowley (1996), mendefinisikan pembangunan pedesaan muncul dari kebutuhan masyarakat pedesaan untuk

memandang pembangunan dari perspektif yang lebih luas yang berfokus pada berbagai tujuan pembangunan daripada hanya memberikan insentif untuk usaha berbasis pertanian atau berbasis sumber daya. Dari perspektif ini, pendidikan, kewirausahaan, infrastruktur fisik, dan infrastruktur sosial memainkan peran penting dalam mengembangkan daerah pedesaan.

5. Rudengren *et al.* (2012) juga mendefinisikan pembangunan pedesaan sebagai proses peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang tinggal di daerah yang relatif terpencil dan jarang penduduknya. Rudengren dkk. menunjukkan bahwa secara tradisional, pembangunan pedesaan berfokus pada eksploitasi sumber daya alam melalui kegiatan intensif darat seperti pertanian dan kehutanan. Di era sekarang, pembangunan pedesaan mengambil pendekatan spasial daripada tematik yang mencerminkan pandangan lintas sektor yang melibatkan aspek sosial, ekonomi, demografis, hukum, keuangan, pemerintahan, dan administratif.

Definisi pembangunan wilayah pedesaan menurut Undang-undang No 6 Tahun 2016 adalah Pembangunan Kawasan Pedesaan adalah pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan

kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif. Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar-Desa dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota. Menurut undang-undang tersebut pembangunan kawasan perdesaan meliputi:

1. Penggunaan dan pemanfaatan wilayah desa dalam rangka penetapan kawasan pembangunansesuai dengan tata ruang kabupaten/kota;
2. Pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan;
3. Pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi perdesaan, dan pengembangan teknologi tepat guna; dan
4. Pemberdayaan masyarakat desa untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi.

1.3. Sistematika Buku

Buku Membangun Keajaiban Wilayah Perdesaan, terdiri atas sebelas bab. Secara rinci bab-bab tersebut sebagai berikut:

- Bab 1. Pendahuluan
- Bab 2. Cara Pandang dan Pendekatan
- Bab 3. Teori yang Mendasari Pembangunan Perdesaan
- Bab 4. Pilar Pembangunan Wilayah Perdesaan
- Bab 5. Proses Membangun Keajaiban Wilayah Perdesaan
- Bab 6. Pengembangan Kelembagaan di Aras

Kabupaten/Kota

- Bab 7. Pengembangan Klaster dan Jejaring Klaster
- Bab 8. Penyusunan RPWP, Pelaksanaan dan Monitoring dan Evaluasi
- Bab 9. *Branding* Wilayah Perdesaan
- Bab 10. Mengukur Perkembangan Wilayah Perdesaan
- Bab 11. Penutup

Isi dari Bab 2 sampai dengan Bab 10 dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu Bagian Konsep yang terdiri dari Bab 2, 3, 4 dan 5 dan Bagian Aplikasi yang terdiri dari Bab 6, 7, 8, 9 dan 10. Bagian Konsep menguraikan tentang cara pandang dan pendekatan serta teori-teori yang mendasari dalam pembangunan wilayah perdesaan untuk membangun keajaiban. Cara pandang yang digunakan merupakan cara pandang baru dari cara pandang yang selama ini digunakan. Selama ini yang digunakan adalah cara pandang dari sisi kekurangan atau masalah lalu dicari pemecahan masalahnya. Sedangkan cara pandang baru dengan menggunakan *Appreciative Inquiry*, yang melihat dari sisi potensi wilayah perdesaan dan kekuatan dari potensi tersebut untuk membangun keajaiban wilayah perdesaan. Demikian juga dengan teori-teori yang digunakan, relatif baru

yaitu untuk mendorong wilayah perdesaan mempunyai daya saing, bukan hanya sekedar membangun.

Bagian Aplikasi sudah seperti buku manual, karena diuraikan secara rinci tahapan dan urutan tahapannya dari berbagai kegiatan. Hal ini untuk memudahkan para pembaca mengaplikasikannya dalam dunia nyata dengan dasar teori. Sehingga dalam melaksanakan suatu kebijakan sandaran teorinya jelas (*knowledge based policy*) bukan hanya mengambil dari langit, angan-angan, penerawangan dan *knocking head*.

Pendekatan klaster (bukan sentra) dalam pembangunan wilayah perdesaan merupakan suatu keniscayaan, kalau menginginkan wilayah perdesaan tersebut memiliki daya saing. Salah satu cara lain untuk meningkatkan daya saing wilayah perdesaan yaitu melalui *place/cluster branding*. Terakhir, hal yang paling penting lainnya adalah mengetahui cara mengukur perkembangan wilayah perdesaan dengan menggunakan analisis kuantitatif. Dari analisis kuantitatif tersebut dapat diketahui status perkembangan wilayah perdesaan dan *leverage attributes* (atribut pengungkit) yang dapat dijadikan dasar untuk menyusun strategi (program dan kebijakan) untuk meningkatkan status perkembangan wilayahnya.

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Penulis dilahirkan di Cirebon, Jawa Barat, pada tanggal 13 Juli 1960, merupakan putra dari ayahanda Sugeng Grindoutomo dan ibunda Betty Samoedi. Masa kecil sampai SMA dilaluinya di Cirebon. Gelar sarjana dalam bidang Ilmu Tanah dari Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor, diraihinya pada tahun 1983. Gelar doktor dalam bidang Perencanaan

Pembangunan Wilayah dan Perdesaan diselesaikannya pada tahun 1995 dari perguruan tinggi yang sama. Beberapa *international short course* telah diikuti antara lain *Strategies for Local Economic Development*, di ITC ILO Turin, *Local Governance and Rural Decentralization*, dan *Market Access for Sustainable Development* di Wageningen University and Research, Center for Development Innovation (WUR CDI) the Netherlands.

Penulis adalah konsultan dan peneliti dalam bidang pembangunan wilayah dan perdesaan, penataan ruang, kemiskinan, pengembangan ekonomi lokal, perumahan, dan kelautan dan perikanan. Penulis pernah menjadi konsultan di Asian Development Bank, World Bank, JICA, CIDA, dan GTZ/GIZ yang dipekerjakan di lembaga pemerintah di Departemen Kelautan dan Perikanan, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, dan BAPPENAS, serta Staf Ahli Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Penulis juga merupakan praktisi untuk memfasilitasi pembentukan klaster dan forum Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL).

Penulis merupakan staf pengajar Sekolah Pascasarjana di Institut Pertanian Bogor, Program Studi Magister Ilmu Kelautan, Fakultas MIPA, Universitas Indonesia, dan Program Pascasarjana Universitas Nusa Bangsa. Selain itu penulis adalah fasilitator pelatihan di bidang perdesaan dan PEL, baik di dalam dan luar negeri antara lain pada *International Short Course on Local Economic Development* yang diadakan oleh WUR CDI di Johannesburg, Afrika Selatan. Dalam organisasi profesi, penulis menjadi Ahli Perencana Utama, Ikatan Ahli Perencana (IAP).